

**PENERAPAN SANKSI PEMBLOKIRAN TERHADAP
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM
SAMSAT KUDUS
(Studi Kasus pada Sistem Administrasi Manunggal Satuan Atap
di Kabupaten Kudus)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum dengan Kekhususan
Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara



Oleh:

MELLYANA DHEA A
NIM. 201820020

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2022

**HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN SANSKI BLOKIR TERHADAP KETIDAKPATUHAN
WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
WILAYAH HUKUM SAMSAT KUDUS**

**(Studi Kasus Pada Sistem Administrasi Manunggal Satuan Atap di
Kabupaten Kudus)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

Hukum Tata Negara

Disusun oleh:

MULLYANA DHEA ARDYANI

NIM. 204820020

Kudus, 02 Maret 2022

Disetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggit Wicaksono, S.H., M.H.

Faizal Adi Surya, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Anggit Wicaksono, S.H., M.H.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mellyana Dhea Ardyani

Nim : 201820020


Alamat : Desa Tanjungrejo RT 05, RW 10, Kecamatan Jekulo
Kabupaten Kudus.

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Blokir Terhadap Ketidakpatuhan Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum SAMSAT
Kabupaten Kudus.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini murni gagasan, rumusan serta penelitian saya sendiri dan tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing skripsi.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang ditulis serta dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis secara jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 2 Maret 2022


Mellyana Dhea Ardyani

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari keyakinan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatannya) yang dikerjakannya. (Q.S. Al-Baqarah:286).”

Kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, karunia serta petunjuk-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan kita dan kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat.
3. Bapak dan Ibuku tersayang.
4. Adik-adiku yang aku sayangi.
5. Bapak Anggit Wicaksono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Faizal Adi Surya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II
6. Bapak dan ibu dosen.
7. Teman-teman ku yang tercinta dari maba sampai waktu yang tidak ditentukan Sabella, Wulan, Irsha, Berliannisa.
8. Teman-teman KKN tercinta Rinda, Kiki, Annisa, Elsa, Gilang, Hendra, Intan.
9. Keluarga besar dari bapak dan ibuku.
10. Untuk diriku sendiri yang sudah berjuang untuk mendapatkan gelar S.H.
11. D.o Kyoongso, Ji chang wook, Hwang In yeoup, dan Cha En woo yang telah memotivasi saya dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Almamaterku Universitas Muria Kudus.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb, Alhamdulillah, rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia berupa kesehatan dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penerapan Sanksi Pemblokiran Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Samsat Kudus (Studi Kasus Pada Sistem Administrasi Manunggal Satuan Atap di Kabupaten Kudus)".

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dalam menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M. Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mura Kudus.
3. Bapak Anggit Wicaksono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Faizal Adi Surya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis hingga skripsi selesai.
5. Bapak Faizal Adi Surya, S.H., M.H., selaku Pelaksana Tugas Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah menyetujui judul skripsi ini.

6. Bapak Dwiyana Achmad H., S.H., S.H.I., M.H., selaku Pelaksana Tugas Wakil Dekan I yang memberikan Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar serta Pegawai Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
8. Semua narasumber yaitu M. Zakki Irfan Susatya, S.E sebagai Kasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kudus, Wajib Pajak yang mendapatkan sanksi bunga/denda, Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak selama 2 (dua) tahun atau lebih dan Agus Saputro, S.H. Petugas Unit Pelaksana Regident STNK di Kantor SAMSAT Kudus.
9. Kedua orang tua saya yang selalu saya sayangi dan juga adik-adiku yang selalu kusayangi.
10. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dan Sahabat-sahabatku KKN 2021.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna untuk itu segala kritik dan saran yang positif, penulis akan terima demi kebaikan bersama. Penulis mengharapkan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, SAMSAT Kudus sebagai Petugas Pajak Kendaraan dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 02 Maret 2022



Melhyana Dhea A

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PEMBLOKIRAN TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM SAMSAT KUDUS (studi kasus pada sistem administrasi manunggal satuan atap di Kabupaten Kudus)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi pemblokiran terhadap ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah SAMSAT Kudus dan hak-hak wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah hukum SAMSAT Kudus yang dikenai sanksi pemblokiran

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yang menggabungkan antara data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pemblokiran terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah hukum SAMSAT Kudus sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintahan dalam menekan jumlah keterlambatan pembayaran pajak. Penegakan hukum perpajakan kendaraan bermotor dengan pemberian sanksi tambahan berupa blokir kendaraan bermotor kepada wajib pajak agar tidak meremehkan peraturan pajak. Wajib pajak yang dikenai sanksi blokir adalah wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraanya selama 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun atau lebih.

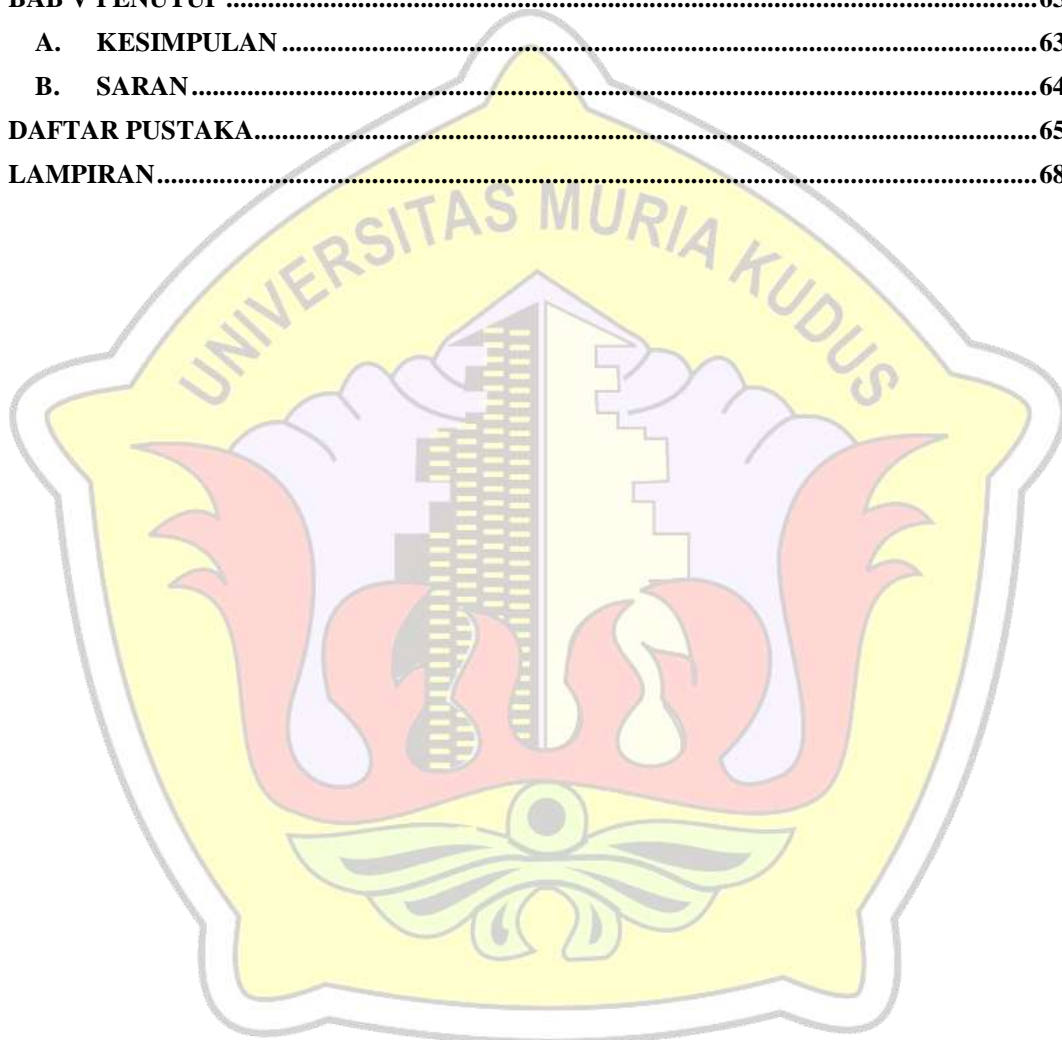
Penjatuhan sanksi blokir kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan hak-hak wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor. Wajib pajak mempunyai hak atas kendaraanya yang telah diregistrasi pada sistem Negara. Hak-hak wajib pajak yang dikenai sanksi pemblokiran KBM tidak dapat diregistrasi ulang, berdasarkan pasal 114 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Blokir KBM, tidak dapat diregistrasi ulang, SAMSAT Kudus.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	12
1. Tinjauan Umum Tentang Pajak	12
2. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Kendaraan Bermotor	19
1. Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
2. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor	20
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	21
C. Tinjauan Umum Tentang STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)	23
D. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Administratif.....	24
1. Sanksi Administratif berupa Denda	24
2. Sanksi Administratif berupa Blokir.....	25
E. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Sanksi Administratif terhadap kesadaran masyarakat.....	28
F. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak wajib Pajak yang dikenai Sanksi Pajak.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Metode Pendekatan	33
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Metode Penentuan Sampel	35
D. Metode Pengumpulan Data	35

E. Metode Pengolahan Dan Penyajian Data.....	36
F. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Penegakan Hukum dengan Penjatuhan Sanksi Pemblokiran terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum SAMSAT Kudus 39	
B. Hak-Hak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum SAMSAT Kudus yang dikenai sanksi Blokir KBM	58
BAB V PENUTUP	63
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	68



DAFTAR TABEL

Table 1 Data SAMSAT Kudus penunggak pajak tahun 2020 bulan September-Agustus 2021.
.....44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Gambar Surat Pemberitahuan Terlambat Pembayaran PKB.....	68
Lampiran 2 Gambar Permohonan Ijin Penelitian	69
Lampiran 3 Gambar Surat Keterangan Survey Lokasi	70

